EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.1, November 2024

Analisis Pemetaan Solvabilitas APBD Pemerintah di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat 2021-2023

Nurwidya Oktavira[1], Siti Sriningsih[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
E-mail: nurwidyaoktavira@gmail.com [1], siti.sriningsih1206@gmail.com [2]

Article History:
Received: 20 Oktober 2024
Revised: 10 November 2024
Accepted: 13 November 2024

Keywords: *Pemetaan, Solvabilitas Anggaran, APBD*

Abstract: *Analisis keuangan merupakan upaya untuk mengenali sifat-sifat keuangan dengan merujuk pada laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Sejak lama, rasio solvabilitas biasanya lebih sering digunakan dalam konteks perusahaan. Dalam studi ini, penulis akan berkonsentrasi pada pemerintahan lokal. Dengan kata lain, peneliti akan melaksanakan studi tentang pemetaan keterampilan keuangan APBD Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2021 hingga 2023. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar analisis tingkat kemampuan membayar utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Nusa Tenggara Barat selama periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peta keterampilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah Nusa Tenggara Barat pada rentang tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Penilaian terhadap kemampuan keuangan anggaran dilakukan dengan mengukur rasio solvabilitas, indeks solvabilitas, dan indeks dimensi yang berhubungan dengan solvabilitas anggaran. Seluruh perhitungan ini adalah tahap akhir dalam mengevaluasi tingkat solvabilitas anggaran tersebut. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan anggaran di Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Lombok, Provinsi NTB, memperlihatkan indikasi yang menggembirakan. Antara tahun 2021 hingga 2023, seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok telah memenuhi kriteria nilai kesehatan keuangan Pemerintah Daerah terkait solvabilitas anggaran.*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rencana finansial yang disusun setiap tahun dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kemudian resmi ditetapkan melalui peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan no. 32 tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan desentralisasi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode satu tahun, yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan aktivitas untuk tahun yang relevan. Peran dari fungsi ini menjadikan APBD memiliki signifikansi besar, sebab seluruh aktivitas pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak tertera dalam APBD (Habiburrahman dan Rahmah Imani, 2016).

Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab dalam mengatur pemerintahan, pembangunan, serta memberikan layanan kepada masyarakat, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan kesempatan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien. Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan lokal adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah disetujui dan diterapkan (Hayati Hemahua, 2014).

Menurut Mahmudi (2016), Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi performa keuangan. Temuan dari analisis ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sesuai dengan pendapat Harahap (2013), analisis keuangan merupakan suatu metode untuk mengenali fitur-fitur keuangan yang berlandaskan pada laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Analisis terhadap data keuangan utama dilakukan dengan membandingkan hasil dari periode sebelumnya dan yang terbaru, sehingga dapat diidentifikasi apakah ada peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Sehingga, sangat penting untuk menjamin ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan agar proses analisis dan penilaian dapat berlangsung secara efisien. Untuk mengevaluasi pertumbuhan kinerja finansial, diperlukan analisis yang komprehensif. Cara yang biasa diterapkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan (Eny Maryanti, dkk. 2022)

Menurut pendapat Juddy dan Jenny (2017), salah satu cara yang sering digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah metode untuk memahami sifat-sifat keuangan dengan mengacu pada berbagai laporan keuangan yang tersedia. Penilaian rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan melalui analisis kinerja keuangan dan potensi finansial daerah.

Rasio keuangan dianalisis dengan melakukan evaluasi solvabilitas anggaran dalam studi ini. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk mendanai aktivitas mereka selama periode anggaran fiskal dapat ditinjau melalui penilaian terhadap kapasitas keuangan anggaran (Nollenberger et al. 2003). Dengan demikian, baik angka yang tercantum di atas maupun di bawah pada indikator dimensi ini harus mencerminkan keseimbangan yang berkesinambungan antara pendapatan rutin pemerintah daerah dan biaya operasional. Ada beberapa standar yang digunakan untuk menilai kemampuan ini. Dengan demikian, semakin banyak dana yang dapat diakses untuk mendukung biaya operasional pemerintah daerah, maka proporsinya akan semakin meningkat. Sebagai akibatnya, peningkatan nilai rasio menunjukkan bahwa keberlangsungan anggaran telah mengalami kemajuan.

Berdasarkan pendapat Noor Anisyah dan Syahran (2022), analisis rasio solvabilitas umumnya lebih sering diterapkan dalam konteks perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada penerapan di level pemerintah daerah. Dengan demikian, peneliti akan melakukan studi mengenai pemetaan kapasitas solvabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk rentang waktu 2021 sampai 2023.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, pertanyaan pokok dalam studi ini adalah bagaimana menganalisis tingkat solvabilitas APBD Pemerintah Nusa Tenggara Barat dari tahun 2021 sampai 2023.

LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Dalam proses pembuatan keputusan di sektor ekonomi, sosial, atau politik, sangatlah krusial untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang menekankan evaluasi informasi yang terdapat dalam laporan tersebut (Mahmudi, 2016: 89). Menganalisis laporan keuangan membutuhkan penerapan berbagai teknik dan tahapan analisis untuk menemukan ukuran serta hubungan penting antara berbagai komponen. Analisis seharusnya berupaya untuk mengurangi atau menghapus penilaian yang didasarkan pada anggapan, ketidakpastian, dan preferensi pribadi.

Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan data terkait dengan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas yang perlu diungkapkan, serta memberikan klarifikasi mengenai perubahan yang terjadi dalam posisi tersebut. Di samping itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pemanfaatan sumber daya ekonomi dan pengelolaan keuangan, melaporkan pencapaian anggaran, serta menjelaskan bagaimana kegiatan entitas yang melapor didanai. Informasi yang disajikan juga berguna dalam menilai kemampuan entitas pelaporan untuk mendanai aktivitasnya. (Fraud, 2016:15)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa elemen dalam laporan keuangan utama mencakup: Laporan Realisasi Anggaran, yang menggambarkan kegiatan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memperlihatkan kesesuaian dengan APBN atau APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar mengenai asal-usul, belanja, serta penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, selama periode tertentu (Rigel Nurul Fathah, 2017).

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun, Firma, dan Heribertus (2011:81), Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebuah catatan yang memuat informasi terperinci mengenai sumber-sumber pendapatan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui melalui peraturan daerah untuk jangka waktu satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan yang disusun dan disepakati secara bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didasarkan pada peraturan yang berlaku di daerah.

Belanja pemerintah sejalan dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam mengatur ekonomi, yang dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang diatur dalam Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja

pemerintah yang berdasarkan fungsi diklasifikasikan ke dalam sembilan kategori, yaitu: kesehatan, pendidikan, perumahan dan infrastruktur umum, pelayanan masyarakat, ekonomi, pariwisata dan kebudayaan, ketertiban serta keamanan, lingkungan, dan perlindungan sosial (Siti Sriningsih, et al., 2023).

Walaupun memiliki otonomi, pemerintah daerah mengalami kesulitan terkait dengan kekuasaan mengenai jenis pajak yang diperbolehkan untuk dipungut. Menurut Pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa seluruh sumber daya ekonomi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah milik negara. Sebagai akibatnya, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai kemandirian suatu wilayah, diperkenalkan indikator efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif kemandirian finansial. Indikator ini diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga yang berlaku saat ini. Rasio ini mencerminkan total pendapatan suatu daerah yang dapat dikonversi menjadi pendapatan riil dalam jangka waktu tertentu (Nur Afiyah Maizunati, 2017).

Solvabilitas

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang mendukung kegiatan operasionalnya dalam satu periode anggaran dikenal dengan istilah "Kelayakan Anggaran" (Nollenberger et al. 2023). Dengan demikian, data yang digunakan dalam indikator untuk dimensi ini harus menggambarkan keseimbangan jangka panjang antara pendapatan tetap pemerintah daerah dan biaya operasional. Dengan demikian, semakin besar total anggaran yang dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah daerah, maka semakin tinggi juga prosentasenya. Akibatnya, peningkatan nilai rasio menandakan bahwa kemampuan anggaran untuk memenuhi kewajiban telah mengalami perkembangan. Parameter kesehatan keuangan daerah dalam evaluasi solvabilitas anggaran dianggap dalam kondisi baik jika nilainya kurang dari 1. Sebaliknya, jika nilainya melebihi 1, maka dianggap tidak sehat. (Ritonga; 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, satu atau lebih variabel bebas dapat dimanfaatkan untuk menentukan nilai suatu variabel tanpa perlu melakukan perbandingan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2019:59).

Berdasarkan sumber informasi yang tersedia, studi ini menggunakan data yang bersifat sekunder. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan yang berasal dari daerah kabupaten dan kota di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dikumpulkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam mengevaluasi kinerja solvabilitas anggaran, diperlukan perhitungan indeks solvabilitas yang diperoleh dari nilai solvabilitas yang telah dihitung sebelumnya. Tujuan dari penghitungan indeks solvabilitas anggaran adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam menanggung pengeluaran operasionalnya. Semakin besar angka yang diperoleh dari perhitungan indeks dimensi solvabilitas anggaran, semakin jelas bahwa Pemerintah Daerah memiliki potensi yang cukup memadai untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Indikator kesehatan finansial yang berkaitan dengan solvabilitas anggaran menurut Ritonga (2014) menunjukkan bahwa kondisi dianggap sehat jika nilainya kurang dari 1, sementara nilai di atas 1 menunjukkan kondisi yang tidak sehat.

Proses perhitungan indeks dimensi solvabilitas anggaran terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. **Menghitung Rasio Solvabilitas Anggaran**

Dalam menentukan rasio solvabilitas anggaran, digunakan laporan keuangan yang sudah diaudit, dengan memanfaatkan data berupa anggaran yang telah direalisasikan (LRA) oleh pemerintah daerah. Rasio solvabilitas anggaran terdiri dari empat jenis, masing-masing dengan metode penghitungan yang berbeda.

Rasio A = (Total Pendapatan – Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / (Total Belanja - Belanja Modal)
Rasio B = (Total Pendapatan – Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / Belanja Operasional
Rasio C = (Total Pendapatan – Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / Belanja Pegawai
Rasio D = Total Pendapatan / Total Belanja

Jumlah penerimaan APBD mengalami penurunan karena dana APBD yang bersifat tidak stabil dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Untuk rasio A, seluruh pengeluaran dilakukan dengan memotong anggaran modal, karena hal tersebut tidak termasuk dalam domain operasional pemerintah daerah. Saat menghitung rasio C, biaya tenaga kerja digunakan sebagai denominator karena merupakan elemen krusial dari total biaya operasional.

2. **Menghitung Indeks Rasio**

Setelah menyelesaikan perhitungan rasio solvabilitas anggaran, langkah selanjutnya adalah menghitung indeks rasio. Menghitung setiap rasio dengan menggunakan rumus:

$$\textbf{Indeks Rasio}_n = \textbf{(Nilai Aktual}_n \textbf{ – Nilai terendah) / (Nilai Tertinggi – Nilai Terendah)}$$

Keterangan:
Indeks Rasio_n = Tahun Anggaran
Nilai Aktual_n = Nilai Rasio Tahun Anggaran
Nilai Tertinggi = Nilai Rasio Paling Besar
Nilai terendah = Nilai Rasio Paling Kecil

Nilai pengamatan paling rendah yang dicatat sepanjang periode pengamatan adalah angka yang paling minimal. Nilai dengan realisasi tertinggi adalah nilai yang berlandaskan pada jumlah data terbanyak yang tercatat selama periode pengamatan. Sebagai konsekuensinya, skor maksimum dari indeks tersebut adalah 1, sedangkan skor minimalnya adalah 0. Setiap tahun, nilai terendah dan tertinggi dihitung.

3. **Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas**

Setelah menyelesaikan perhitungan rasio indeks dan mendapatkan hasilnya, langkah selanjutnya adalah menghitung indeks berdasarkan dimensi. Rata-rata aritmetika dari rasio yang menyusun indeks dimensi. Menurut Ritonga (2014), terdapat asumsi bahwa setiap indikator dalam indeks memiliki tingkat relevansi yang sama. Rata-rata aritmetika dari rasio solvabilitas anggaran digunakan untuk menentukan indeks terkait dengan aspek solvabilitas anggaran. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

(Indeks Rasio A + Indeks Rasio B + Indeks Rasio C + Indeks Rasio D)

Keterangan:

Indeks Rasio A = Indeks Rasio A Tahun Anggaran

Indeks Rasio B = Indeks Rasio B Tahun Anggaran
Indeks Rasio C = Indeks Rasio C Tahun Anggaran
Indeks Rasio D = Indeks Rasio DTahun Anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemampuan pengelolaan anggaran keuangan di setiap Kabupaten dan Kota tersebut. Analisis akan dibahas dengan rinci dan terperinci, langkah demi langkah, sebagai berikut:

1. **Rasio Solvabilitas Anggaran**

Rasio solvabilitas dalam anggaran terdiri atas empat jenis rasio, yakni Rasio A, Rasio B, Rasio C, dan Rasio D. Berikut adalah ringkasan tentang kemampuan dalam mengelola anggaran:

Tabel 1. Rasio Solvabilitas Anggaran Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kota/ Kabupaten	2021				2022				2023			
	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D
Lombok Barat	1.10	1.31	2.13	1.03	1.04	1.26	2.08	1.00	1.09	1.30	2.28	1.02
Mataram	1.11	1.13	2.50	1.03	1.13	1.14	2.59	1.02	1.14	1.15	2.70	1.01
Lombok Tengah	-0.12	-0.14	-0.23	0.00	1.19	1.46	3.38	1.00	1.04	1.25	2.05	1.00
Lombok Timur	1.06	1.33	2.40	1.00	1.01	1.24	2.46	0.91	0.01	1.36	2.55	0.01
Lombok Utara	1.05	1.26	2.54	1.00	1.12	1.37	2.71	1.01	1.09	1.30	2.40	0.99

Sumber: Data diolah, 2024

Daerah perkotaan dan pedesaan yang terletak di pulau Lombok, yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan berbagai level kemampuan dalam hal kelayakan anggaran. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK), total belanja, investasi, biaya operasional, dan pengeluaran untuk pegawai di masing-masing Kabupaten dan Kota setiap tahun anggaran.

Menurut tabel 1 yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara mencatatkan rasio tertinggi di antara empat rasio yang tersedia, yaitu rasio C dengan nilai 2,54. Pada tahun 2022, Kabupaten Lombok Tengah mencatatkan rasio tertinggi dalam kategori C, dengan nilai mencapai 3. Pada tahun 2023, Kota Mataram mencatatkan rasio tertinggi dalam kategori C dengan nilai mencapai 2,70.

Di sisi lain, Kabupaten Lombok Tengah mencatatkan rasio solvabilitas terendah di seluruh kabupaten/kota di pulau Lombok selama periode 2021-2023. Hal ini terjadi pada tahun 2021. Empat rasio solvabilitas yang didapat seluruhnya menunjukkan nilai negatif, dan hal ini terjadi pada tahun 2021. Hal ini terjadi akibat pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah Lombok Tengah pada tahun 2021 sangat minim jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Atau dapat diungkapkan bahwa pengeluaran melebihi pendapatan. Namun, pada tahun selanjutnya, yaitu 2022-2023, terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu mencolok.

2. **Indeks Rasio Solvabilitas Anggaran**

Indeks rasio solvabilitas anggaran adalah ukuran yang dipakai untuk menilai sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan dan menjaga layanan untuk masyarakat. Berikut adalah ringkasan mengenai indeks rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan anggaran.

Tabel 2. Indeks Rasio Solvabilitas Anggaran Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kota/ Kabupaten	Rasio A			Rasio B			Rasio C			Rasio D		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Lombok Barat	0.99	0.17	0.96	0.99	0.38	0.71	0.85	0	0.35	1	0.82	1
Mataram	1	0.67	1	0.86	0	0	0.99	0.39	1	1	1	0.99
Lombok Tengah	0	1	0.91	0	1	0.48	0	1	0	0	0.82	0.98
Lombok Timur	0.96	0	0	1	0.31	1	0.95	0.29	0.77	0.97	0	0
Lombok Utara	0.95	0.61	0.96	0.95	0.72	0.71	1	0.48	0.54	0.97	0.91	0.97

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada tabel 2 yang telah disajikan, terlihat bahwa indeks rasio tertinggi mencapai angka 1, di mana seluruh kota dan kabupaten yang dianalisis menunjukkan nilai rasio 1 pada berbagai tahun. Sementara itu, nilai rasio terendah muncul pada Kabupaten Lombok Barat dengan rasio c sebesar 0,17 pada tahun 2021.

3. **Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran**

Kemampuan anggaran mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah (PEMDA) dalam mengumpulkan pendapatan guna menutupi pengeluaran operasionalnya. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Ritonga (2014), indikator kesehatan finansial pemerintah daerah terkait dengan solvabilitas anggaran adalah sebesar 0,142. Indeks yang mencerminkan aspek kemampuan bayar anggaran merupakan perhitungan terakhir yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan finansial anggaran. Formula untuk menentukan indeks dimensi solvabilitas anggaran mencakup penjumlahan Indeks Rasio A, Indeks Rasio B, Indeks Rasio C, dan Indeks Rasio D, kemudian hasil total tersebut dibagi dengan 4.

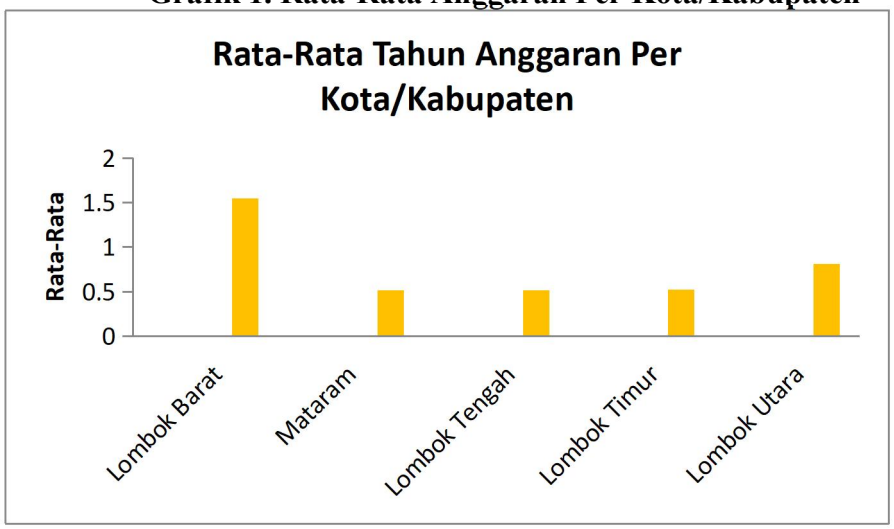
Berikut adalah ringkasan mengenai indeks dimensi kemampuan dalam pembiayaan anggaran.

Tabel 3. Indeks Dimensi Rasio Solvabilitas Anggaran Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kota/ Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-Rata per Kabupaten/Kota
	2021	2022	2023	
Lombok Barat	0.96	0.34	0.76	1.55
Mataram	0.96	0.51	0.75	0.516
Lombok Tengah	0	0.95	0.59	0.513
Lombok Timur	0.97	0.15	0.44	0.52
Lombok Utara	0.97	0.68	0.79	0.813
Rata-Rata/Tahun	**0.77**	**0.53**	**0.67**	

Sumber: Data diolah, 2024

Grafik 1. Rata-Rata Anggaran Per Kota/Kabupaten



Grafik 2. Rata-Rata Anggaran Per Kota/Kabupaten



Analisis indeks dimensi kemampuan membayar anggaran untuk daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki nilai rata-rata terendah yang tercatat sebesar 0,513, sedangkan nilai rata-rata tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Barat dengan angka 1,55. Rata-rata indeks solvabilitas anggaran tahunan antara tahun 2021 dan 2023 menunjukkan bahwa nilai terendah yang dicatat adalah 0,53 pada tahun anggaran 2022, sedangkan nilai tertinggi mencapai 0,77 pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan rata-rata dari masing-masing kabupaten/kota dan tahunnya, analisis menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan biaya operasional. Ini dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kriteria solvabilitas anggaran.

Tanggapan mengenai kemampuan solvabilitas anggaran untuk setiap kabupaten dan kota akan diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap kemampuan pelaksanaan anggaran dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan hasil yang memuaskan. Indeks solvabilitas anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan hasil yang menguntungkan. Di sepanjang periode anggaran tahun 2021 hingga 2023, nilai yang diraih telah melampaui kriteria indikator kesehatan keuangan bagi

pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki kemampuan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional.

2. Pemeriksaan kondisi keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram untuk periode anggaran 2021-2023 menunjukkan hasil yang cukup positif. Indeks kemampuan pembayaran anggaran dalam laporan keuangan Kota Mataram menunjukkan hasil yang baik, karena di sepanjang periode anggaran 2021-2023, skor indikator kesehatan keuangan daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Mataram memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya.
3. Evaluasi terhadap kapasitas finansial dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena telah melebihi standar indikator kesehatan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Lombok Tengah belum mendapatkan nilai pada indikator kesehatan keuangan PEMDA yang tercatat dengan angka 0.
4. Penilaian terhadap kemampuan keuangan anggaran dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Timur untuk periode anggaran 2021-2023 memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Indeks yang mengukur solvabilitas anggaran dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dikarenakan selama tahun anggaran 2021-2023, nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA telah terlampaui. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mendukung pengeluaran operasional.
5. Penilaian mengenai kemampuan anggaran dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Utara untuk periode 2021-2023 memperlihatkan hasil yang positif. Indeks kemampuan keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan hasil yang positif. Perolehan indikator kesehatan keuangan pemerintah daerah (PEMDA) menunjukkan keberhasilan yang terlampaui dalam periode anggaran tahun 2021 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk mendukung biaya operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas keuangan di lima kabupaten dan kota di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan performa yang positif. Dalam tiga tahun terakhir, seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah sukses mencapai standar kesehatan keuangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kemampuan solvabilitas anggaran. Meski terdapat fluktuasi di mana beberapa tahun menunjukkan penurunan dan tahun-tahun lainnya menunjukkan kenaikan, secara keseluruhan hasilnya tetap memuaskan. Nilai tertinggi rata-rata untuk solvabilitas anggaran mencapai 0,77 pada tahun 2021, sedangkan nilai terendah rata-rata untuk solvabilitas anggaran berada di angka 0,53 pada tahun 2022. Dalam konteks daerah kabupaten dan kota, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan nilai rata-rata terendah yang mencapai 0,513, sedangkan Kabupaten Lombok Barat mencatat nilai rata-rata tertinggi sebesar 1,55.

Saran

Berdasarkan klarifikasi dari hasil diskusi, rekomendasi dalam studi:

1. Pemerintah daerah di setiap kabupaten dan kota di Provinsi NTB yang telah mencapai indikator solvabilitas anggaran perlu terus menjaga stabilitas situasi keuangan mereka.

2. Pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi NTB yang belum memenuhi standar solvabilitas anggaran perlu terus berusaha untuk memaksimalkan alokasi pendapatan demi mendukung biaya operasional di daerah.
3. Melakukan penilaian rutin terhadap laporan keuangan tahunan guna menentukan apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan.

DAFTAR REFERENSI

Anisyah,Noor dan Syahran. (Eds). 2022. Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Solvabilitas dan Likuiditas di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. *Jurnal IDEAS (Pendidikan, Sosial dan Budaya), Vol. 8, No. 1, ISSN 2656-940X. Februari, 43-52.*

Eny Maryanti, *et al.* Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Struktur Modal dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Indonesian Journal of Inovation Studies, Vol. 18. No, 11. Oktober 2022. ISSN: 2598-9936.

Faud,M. Ramli. (Eds). 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Habiburrahman dan Rahmah Imani. Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 6 No. 2 April 2016. ISSN : 2087-0701

Harahap, S. S. (Ed). 2013. *Analisis kritis atas laporan keuangan (Cetakan Ke)*. Rajawali Pers.

Hayati, H. (Ed). 2014. ANALISIS APBD KOTA SURABAYA "Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah". *Jurnal Media Trend, Vol. 9, No. 1 Maret; 54–68*

Juddy, J. P dan Jenny, M. (Eds). 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. *Jurnal Accountability, Volume 06, Nomor 01, 45-56*

Mahmudi. (Ed) 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Moh, dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: BPFE.

Nur Afiyah Maizunati. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. J*urnal Riset Akutansi Keuangan*. Volume 2 No. 2 April 2017

Nollenberger, K., *et al*. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Governement.* Washington DC: International City County Managers Association.

Rigel Nurul Fathah, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, Vol.8, No. 1, Juni 2017. ISSN (online): 2442 - 4439 ISSN (print): 2087 - 1406

Ritonga, Irwan Taufiq. (Ed). 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Siti Sriningsih, *et al.* Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia. East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Vol.2, No.5 2023: 1933-1956.

Sugiyono. (Ed). 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Al Umar, A. U. A., Lorenza, L., Savitri, A. S. N., Widayanti, H., & Mustofa, M. T. L. (2020).

Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Balance*, *16*(1), 1-12.

Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, *5*(02).